

KAWASAN “PUSAT KOTA” DALAM PERKEMBANGAN SEJARAH PERKOTAAN DI JAWA

Rully Damayanti

Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Petra
e-mail: rully@peter.petra.ac.id

Handinoto

Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur, Universitas Kristen Petra
e-mail: handinot@peter.petra.ac.id

ABSTRAK

Pengertian ‘pusat kota’ pada kota-kota di Jawa terus berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Keadaan sosial politik, termasuk sistim pemerintahan, letak geografis, serta sejarah masa lalu sebuah kota sangat berpengaruh pada kawasan yang disebut sebagai ‘pusat kota’. Setelah th. 1980 an dengan adanya perpindahan industri skala kecil dan menengah dari negara maju ke negara berkembang yang sebagian besar bertempat di pinggiran kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang, maka kesenjangan jarak antara pusat dan pinggiran ini makin tipis. Majunya transportasi mengurangi kesenjangan antara pusat dan pinggiran kota tersebut. Karena panjang jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan pada abad 21, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang, maka timbullah lagi kesenjangan antara pusat dan pinggiran kota.

Kata kunci: Pusat Kota, Sejarah perkembangan kota di Jawa.

ABSTRACT

Meaning of ‘urban centre’ terminology is adaptable with urban history. Political situation; includes government system, geographical condition, history of the past are three major keys to understand the meaning of ‘urban centre’. In Jakarta, Semarang and Surabaya, urban centre created a gap with city periphery. The gap, since 1980s, becomes less and less because the existence of small to medium scale industry which is located surrounding the city centre. During 1980s, political situation encouraged the types of industry to grow in developing country, such as Indonesia, which are firstly located in developed country. Street development in Indonesia also reduces the gap. In the 21st century, there is unbalance quantity of street length in big city; such as Jakarta, Surabaya, Bandung, and Semarang, and number of vehicle. Hence, this condition creates a new gap between city centre and periphery.

Keywords: city centre, urban history of Java.

PENDAHULUAN

Kawasan ‘pusat kota’, bisa ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang menyebut dengan istilah ‘urban center’ atau ‘urban core’. Ada yang menganggap pusat kota sebagai ‘central bussines district’¹. Ada pula yang menyebut pusat kota sebagai kawasan komplek pemerintahan atau ‘civic center’. Istilah ‘pusat kota’, menimbulkan adanya kawasan yang disebut sebagai ‘pinggiran kota’. Semuanya ini tentunya tergantung dari sejarah perkembangan di masing-masing kota tersebut. Kota-kota di Jawa berkembang dengan sangat pesat sekali, terutama setelah awal abad ke 20¹. Hal ini

disebabkan karena perkembangan penduduknya yang sangat cepat², akibat besarnya urbanisasi yang terjadi pada kota-kota di Jawa dari tahun ketahun. Daerah yang disebut sebagai ‘pusat kota’ sering mengalami pemugaran untuk disesuaikan dengan tuntutan baru, terutama pada awal abad ke 21 ini. Tulisan ini membahas tentang sejarah perkembangan kota di Jawa dengan memakai kawasan ‘pusat kota’

¹ Terutama setelah pelaksanaan undang-undang Desentralisasi pada th. 1905, dimana beberapa kota di Indonesia ditetapkan sebagai *gemeente* (kota madya) yang mempunyai pemerintahan adminstrasi sendiri dan dikepalai oleh seorang walikota.

² Penduduk Jawa th. 1815 hanya berjumlah 4,6 juta. Th. 1831 berkembang menjadi 6 juta. Selanjutnya Th.1845 menjadi 9,5 juta. Th. 1855-10,9 juta jiwa . Th.1870-16,4 juta. Th.1880-19,7 juta. Th.1905-30 juta. Th.1920-35 juta. Th.1930-41,7 juta. Th.1950-50,4 juta. Th.1961-62,9 juta. Th.1971-76 juta. Th.1980 sudah menjadi 92 juta jiwa. Perkembangan penduduk yang sangat cepat terlihat setelah awal abad ke 20. Kepadatan penduduk di Jawa sekarang rata-rata 2000 orang /km².(Lombard, jilid 3, 1996:54). Sedangkan kota-kotanya seperti Surabaya misalnya th. 1905 jumlah penduduknya 150.000 jiwa, th. 1930 sudah menjadi 341.000 jiwa. Pada th.1991 penduduknya menjadi : 2.473.272 jiwa .

sebagai pokok bahasan. Perlu dijelaskan bahwa pembahasan tentang ‘pusat kota’ disini merupakan pembahasan tentang bentuk dan struktur kota secara phisik, bukan dalam arti kebudayaan. Dimana bisa ditafsirkan bahwa pusat dan pinggiran dibentuk dalam representasi politik.

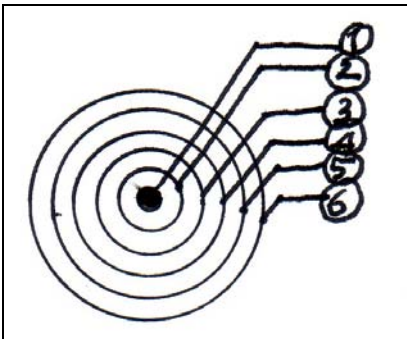
PUSAT KOTA PADA JAMAN PRA KOLONIAL SAMPAI ABAD 18 DI JAWA

Secara geografis kota Jawa dapat dibagi menjadi dua bagian. Yaitu kota ‘Pesisir’ dan kota ‘Pedalaman’. Baik Kota Pesisir maupun kota pedalaman pada awal perkembangannya mempunyai struktur yang sama³. Hanya dalam perkembangan sejarah selanjutnya kemudian kota Pesisir mempunyai struktur yang berbeda dengan kota Pedalaman. Hal ini disebabkan karena kota Pesisir nantinya lebih banyak berinteraksi dengan orang asing dari ‘seberang’ sebagai akibat kemajuan dalam bidang pelayaran. Sehingga penduduk kota Pasisir lebih hiterogin jika dibandingkan dengan penduduk kota Pedalaman yang relatif lebih homogen.

Anderson (1983), memberikan gambaran tentang kota-kota Jawa pada masa prakolonial sbb: kota-kota Jawa pada jaman prakolonial ibaratnya seperti nyala bola lampu di malam hari. Makin terang cahaya lampu, makin banyak binatang malam yang mengelilinginya. Makin suram cahaya lampu makin sedikit binatang malam yang merubung. Artinya makin kuat seorang penguasa pada sebuah kota, maka makin besar kotanya. Sebaliknya makin lemah penguasa, secara otomatis kotanya akan menyusut. Jadi kota Jawa pada jaman prakolonial pada hakekatnya tidak mempunyai batas administratif yang tetap. Semuanya tergantung pada penguasanya. Seorang penguasa biasanya berkedudukan di ibukota kerajaan atau kabupaten. Itulah sebabnya begitu mudahnya kota-kota besar dimasa lampau seperti Demak, Kota Gede, Kartasura, Pajang dan lain-lain bisa runtuh bahkan hilang tanpa bekas. Contoh yang jelas adalah Pajang.

Kota Jawa pada jaman prakolonial pada dasarnya menganut pola kota Mandala, sebagai

penerusan dari kebiasaan kota-kota pada jaman Hindu Jawa (lihat gb 1,2,3,4 dan 5,6). Dalam pelaksanaannya kota Jawa dimasa lampau mempunyai pusat (inti) kota, yang berupa istana penguasa (Keraton atau Kabupaten) dengan alun-alun dan bangunan penting⁴ lain di sekitarnya. Kalau musuh ingin menghancurkan atau menaklukkan penguasa setempat, maka simbol kekuasaan phisik seperti istana atau keraton serta bangunan pendukungnya harus diratakan dengan tanah. Ibaratnya lampunya harus dimatikan dulu. Sehingga kota itu kemudian jadi lemah atau bahkan mati.



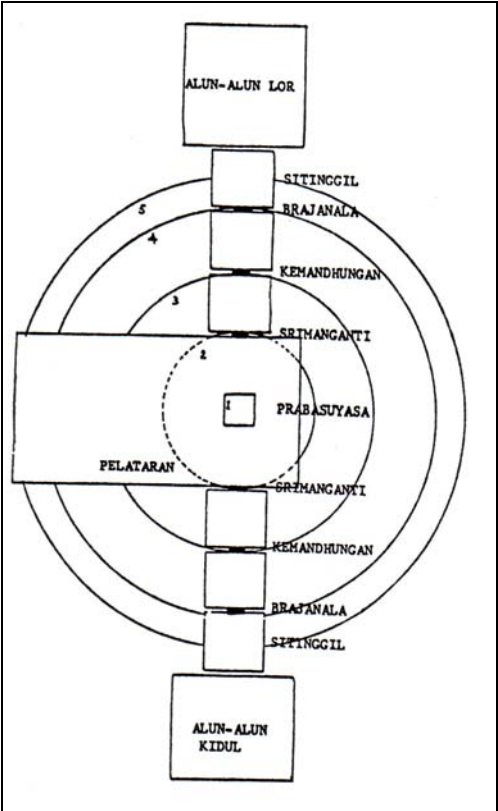
Konsep Penataan Wilayah

Keterangan:

1. Sultan, Pusat kuasa, bisa diibaratkan sebagai dalem Sultan dan dimana pusaka kerajaan disimpan.
2. Batas Benteng Keraton, dimana didalamnya juga terdapat permukiman keluarga Sultan (*royal compound*), pembantu, serta prajurit pengawal
3. “Nagara” atau sama dengan ibukota, dimana pusat administrasi dan pemerintahan terdapat disana. Permukiman para pejabat istana (*priyayi*) yang berbentuk “compound” serta Kepatihan dan permukiman orang asing (Belanda, Cina), juga terdapat disana.
4. “Narawita Dalem”, tanah pertanian dibawah kekuasaan langsung Sultan, dimana semua kebutuhan keraton akan palawija, sayur-mayur, rumput untuk kuda keraton, dsb.nya berasal dari sana.
5. “Naragung”, dimana tanah lungguh (*apanage*) dari pejabat istana terletak.
6. “Mancanegara”, dibawah kekuasaan beberapa Bupati. Daerah pesisir, termasuk daerah Mancanegara.

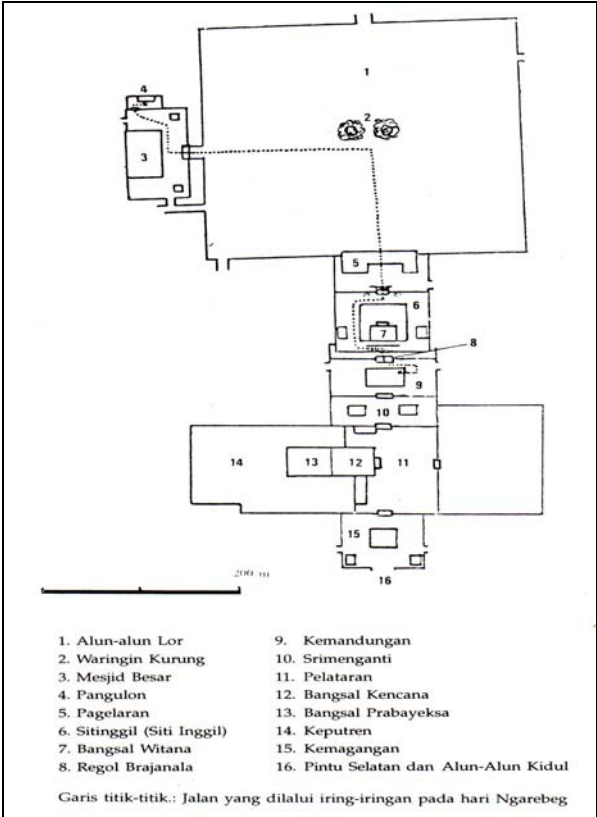
³ Penjelasan lebih rinci tentang struktur kota Jawa pada jaman prakolonial diberikan oleh Jo Santoso (1981). Menurut Santoso (1981:37) struktur yang sama tersebut dapat ditengarai dengan adanya ciri-ciri sbb: Dominasi poros Utara-Selatan, letak Mesjid, fungsi dan letak Alun-Alun, Keraton dan Pasar, dan sebagainya yang pada hakekatnya berasal dari jaman pra Islam. Sedangkan penataan kota-kota Jawa pada jaman prakolonial didasarkan atas konsep mikrokomis hirarkis dan mikrokosmis dualistis. Penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini lihat: Santoso (1984). *Konsep Struktur & Bentuk Kota Jawa s/d Abad 18*.

⁴ Bangunan penting yang ada disekeliling istana (keraton) tersebut, merupakan tempat tinggal pembantu utama atau kerabat dekat keraton. Sistim penataan bangunan tersebut sering disebut sebagai sistim ‘pager sari’. Dalam hal ini berlaku sistim Kawula dan Gusti. Dimana keraton raja (Gusti) dalam penataannya dikelilingi oleh bangunan kawulanya. Penjelasan lebih rinci tentang penataan ‘mager sari’ ini lihat: Ikaputra (1995), *A Study On The Contemporary Utilization Of The Javanese Urban Heritage And Its Effect On Historicity*. An Attempt to Introduce The Contextual Adaptability Into The Preservation of Historic Environment of Yogyakarta. Disertasi, Osaka University, Japan. Dan Ikaputra (1999) *Menelusuri Dalem Pangeran Pada Kawasan Kraton Yogyakarta*, Makalah Pada LNSPA IV, Yogyakarta 23-24 April 1999. Lihat juga Pigeaud, Theodore G. Th (1960), *Java In The 14th Century*, The Hague-Martinus Nijhoff, Jilid III.

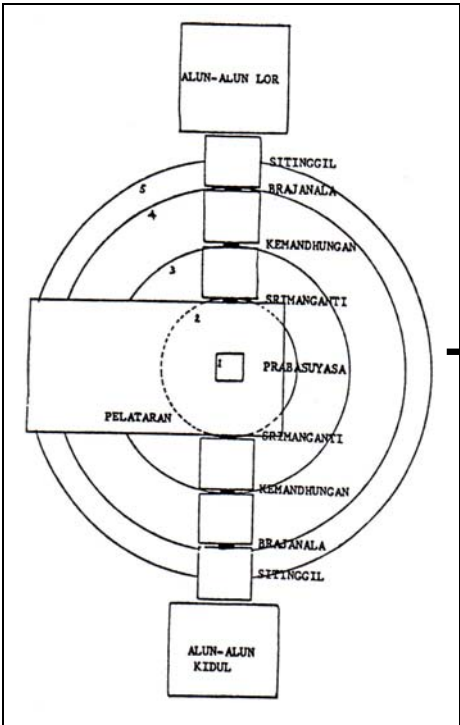


(Sumber asli: Behrend, 1983:182)

Gambar 1. Konsep kraton Jawa sebagai Implementasi “Imago Mundi” atau citra mikrokosmos.

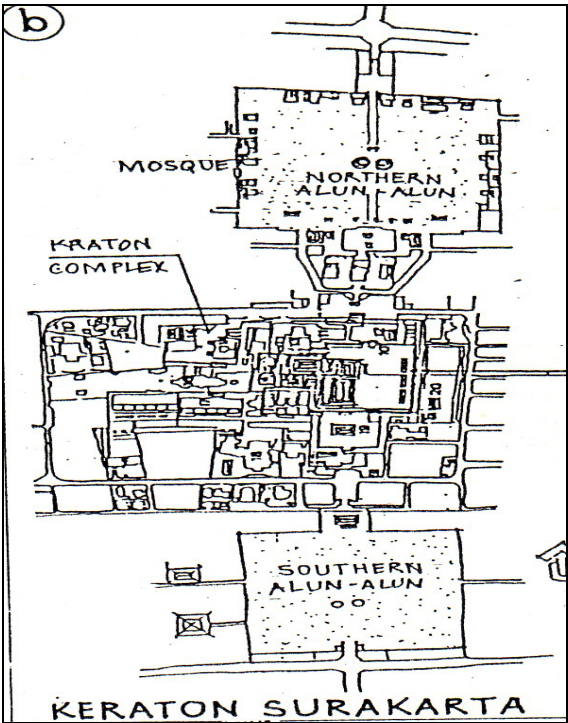


Gambar 2. Inti Keraton Yogyakarta, sebagai implementasi dari konsep penataan jagad makrokosmos kedalam kehidupan mikrokosmos



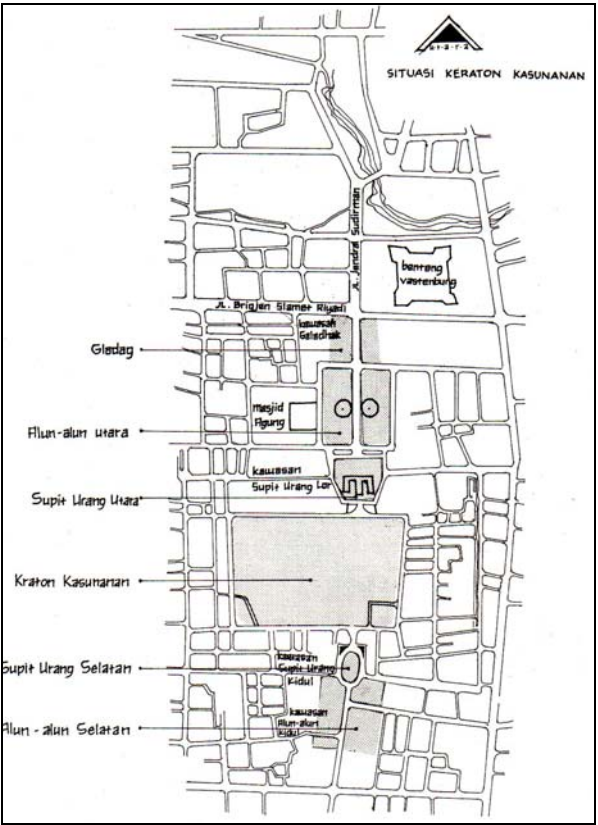
(Sumber asli: Behrend, 1983:182)

Gambar 3. Konsep kraton Jawa sebagai implementasi dari “Imago Mundi” atau citra mikrokosmos.



Gambar 4. Inti Keraton Surakarta, sebagai implementasi dari konsep penataan jagad makrokosmos kedalam kehidupan mikrokosmos.

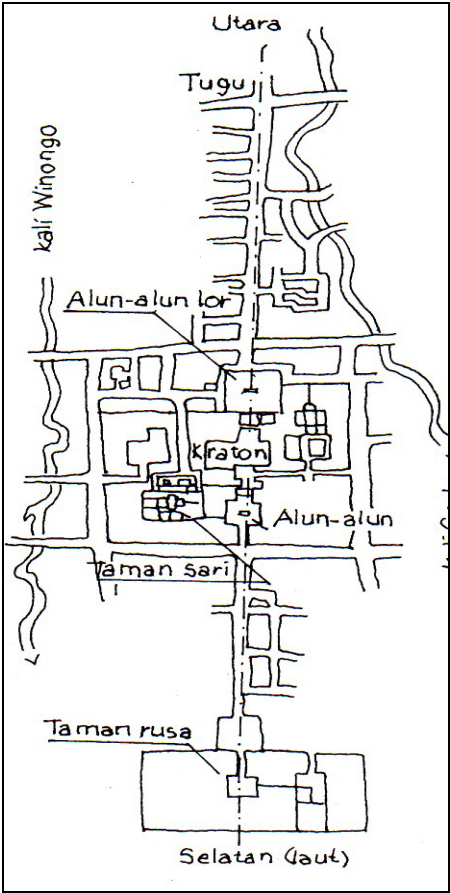
Perjalanan sejarah, memperlihatkan bahwa pelaksanaan yang terbaik dalam pembangunan sebuah kota, sesuai dengan konsep yang telah digariskan, adalah dibawah pemerintahan otoriter atau penguasa yang mempunyai kekuasaan absolut (Catanese, 1988:36). Sejak abad ke 18, kekuasaan raja Jawa harus berbagi dengan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Akibat dari keadaan politik seperti tersebut diatas maka ibukota kerajaan Surakarta dan Jogjakarta tidak bisa dirancang sesuai dengan konsep yang telah ada sejak jaman Hindu Jawa. Itulah sebabnya pada pusat kota Surakarta maupun Jogjakarta terdapat benteng dan kantor Gubernur Belanda (lihat gambar 5 dan 6).



Gambar 5. Kawasan pusat kota Surakarta dengan keraton serta alun-alun sebagai intinya

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang disebut sebagai ‘pusat kota’ pada kota-kota di Jawa di jaman prakolonial adalah Keraton serta bangunan yang ada disekelilingnya. Di satu kota kadang-kadang terdapat dua keraton (di Jogjakarta, keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan keraton Pakualaman, di Surakarta keraton Surakarta Adiningrat dan keraton Mangkunegaran). Meskipun kedua keraton itu tidak sama besarnya, tapi ada kecenderungan kota-kota tersebut se-olah-olah mempunyai dua ‘pusat kota’. Pada perkembangan-

nya kota-kota tradisional (Solo dan Jogja) pada abad ke 18 di ‘pusat kota’ nya terdapat unsur asing berupa benteng serta kantor Gubernur Belanda. Perkembangan ini nantinya menjadi model pusat kota pada kota-kota Kabupaten di Jawa pada abad ke 19.



Gambar 6. Kawasan pusat kota Jogja dengan alun-alun, keraton serta jl. Malioboro sebagai intinya.

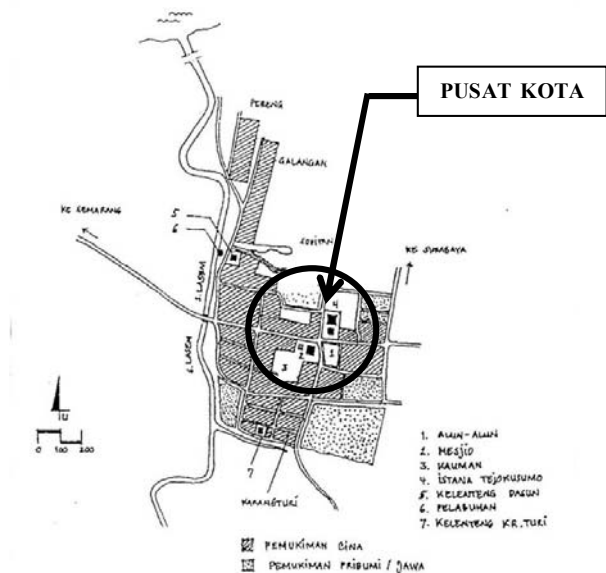
PUSAT KOTA PESISIR PADA JAMAN PRA KOLONIAL DI JAWA

Pada abad ke 13 sampai abad ke 15 , terjadi peningkatan perniagaan yang besar di Asia Tenggara pada umumnya dan Jawa pada khususnya. Akibat dari kemajuan dalam bidang pelayaran, banyak pedagang asing datang ke kota-kota di pantai Utara Jawa. Mereka ini datang dari India (Jambudwipa), Kamboja, Cina, Vietnam (Yawana), Campa, India Selatan, Bengali dan Siam⁵.

Akibat dari kemajuan perdagangan tersebut adalah timbulnya elite-elite baru di daerah perkotaan

⁵ Penjelasan yang lebih rinci tentang peningkatan perniagaan di Asia Tenggara abad 13-15, dapat dibaca di buku: Nusa Jawa: Silang Budaya jilid 2, Denys Lombart (1996:29-47), PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.

di pantai Utara Jawa. Elite baru ini tidak lagi berada di kota pedalaman ditengah dataran persawahan, tapi di dekat laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Pada masa itu kota Pesisir menjadi pusat peradaban baru. Timbullah kota-kota pelabuhan besar di Jawa seperti Tuban, Gresik dan Surabaya serta kota-kota lain di pantai Utara Jawa. Pedagang asing pun banyak yang bermukim di bagian tertentu di kota-kota Pesisir tersebut. Maka timbullah dua daerah menjadi pusat kotanya yaitu ‘kawasan pemerintahan’ (*political domain*) dan ‘kawasan perdagangan’ (*economical domain*). Banyak orang-orang kaya akibat perdagangan di kota-kota pantai tersebut kemudian diangkat menjadi penguasa di daerahnya. Hal ini berakibat kawasan perdagangan dan kawasan pemerintahan kemudian lebur menjadi satu di dalam pusat kotanya. Peristiwa seperti ini sering terjadi di kota-kota pantai Utara Jawa sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa disana. Contoh seperti itu dulu adalah kota Lasem, Gresik, Japara dsb.nya.



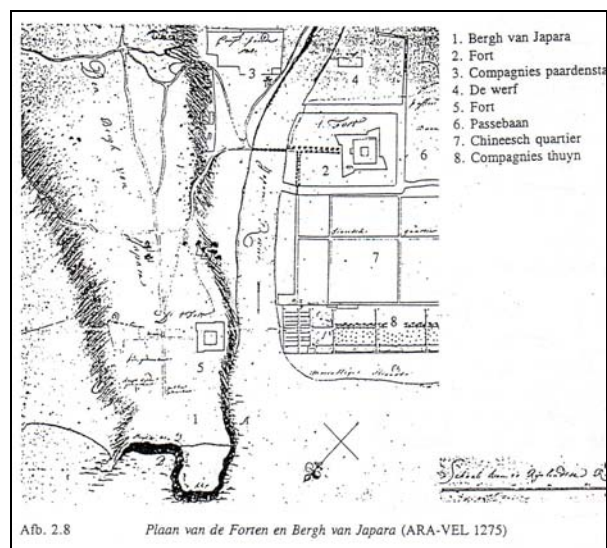
Gambar 7. Peta kota Lasem pada abad ke17, dimana daerah pusat pemerintahan (*political domain*) telah bercampur dengan daerah perdagangan (*economical domain*), yang didominasi oleh pedagang Tionghoa

PUSAT KOTA-KOTA DI JAWA PADA JAMAN VOC (ABAD 18) SAMPAI AKHIR ABAD KE 19

Sebelum menguasai sebuah kota, VOC biasanya mendirikan bentengnya dulu di tepi sungai yang juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan hasil bumi yang akan diangkut ke Eropa. Setelah kedudukannya kuat dan menguasai kota secara keseluruhan baru ia

keluar dari bentengnya dan mendirikan sebuah ‘*townhall*’ yang dikelilingi oleh bangunan pelengkap lainnya. Tidak lupa biasanya selalu didirikan sebuah rumah yatim piatu (*jongenweshuis*) untuk menampung anak yang belum dewasa dari orang Belanda di Nusantara yang orang tuanya telah meninggal, di dekat *townhall* tersebut.

Daerah sekitar *townhall* itulah nantinya menjadi ‘pusat kota’ yang baru. Jalan besar di ‘pusat kota’ dekat *townhall* tersebut biasanya dinamakan ‘*heerenstraat*’⁶.



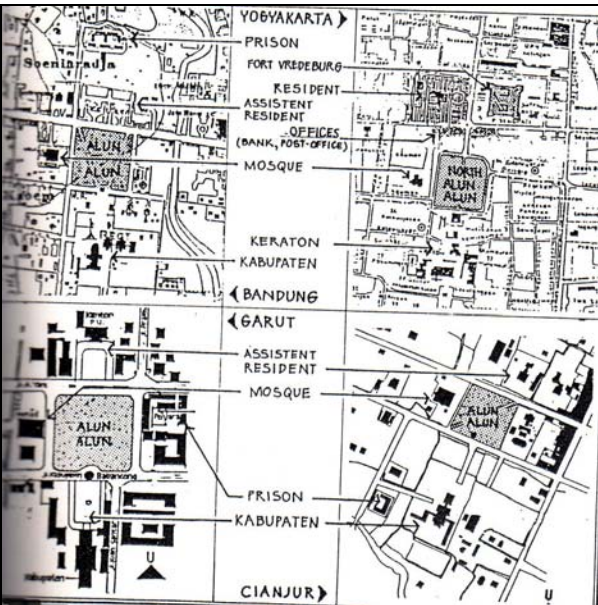
Gambar 8. Peta kota Jepara abad ke 17. Terlihat mulai adanya perubahan dari daerah pusat kota, dengan adanya unsur benteng Belanda dipinggir sungai.

Hal yang menarik pada sistim kolonisasi Belanda di Nusantara terletak pada cara pemerintahannya. Cara tersebut terkenal dengan istilah ‘*indirect rule*’ (memerintah dengan cara tidak langsung).

Pusat kota-kota kolonial di Jawa pada pada abad ke 18, pada awalnya terpecah menjadi dua, yaitu pusat pemerintahan Pribumi (terletak di alun-alun dengan Kabupatennya), serta pusat pemerintahan Kolonial, dengan gedung Residen (untuk ibukota Karesidenan) atau Asisten Residen (untuk ibukota Kabupaten). Contohnya seperti Pasuruan, Banyumas, dsb.nya. Kota-kota seperti itu sering disebut sebagai ‘*Oud Indische Stad*’ (Kota Hindia Belanda Lama). Pada akhir abad ke 18, kawasan pemerintahan Pribumi dan kawasan pemerintahan Kolonial Belanda ini diusahakan untuk dijadikan

⁶ Nama ini berasal dari pemegang saham perusahaan VOC yang berjumlah 17 orang. Oleh sebab itu sering disebut sebagai ‘*heerenseventeen*’.

satu. Contohnya adalah Probolinggo, Malang, Garut, Cianjur dsbnya. Kota seperti itu sering disebut sebagai “*Nieuwe Indische Stad*” (Kota Hindia Belanda Baru). Sedangkan daerah perdagangan meskipun tetap menjadi kawasan yang ramai, tapi pamornya sebagai pusat kota jadi menurun.



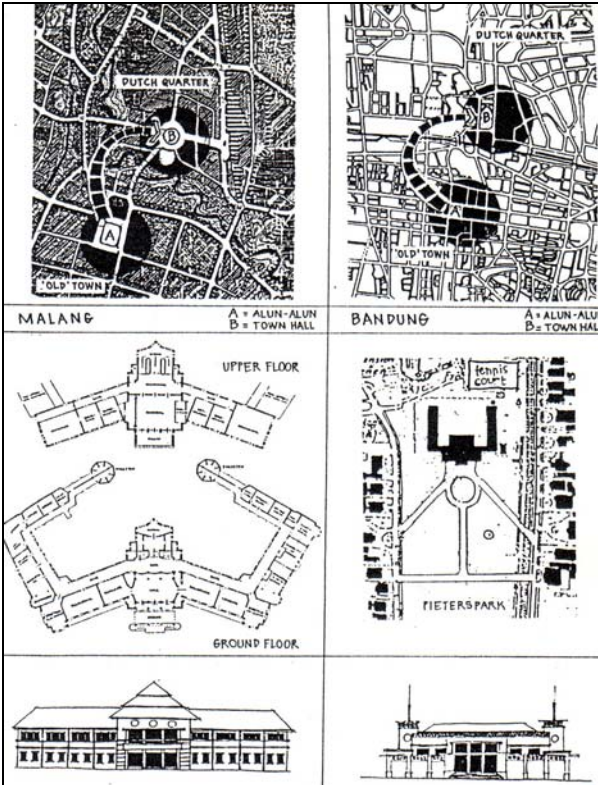
Sumber: Siregar, Sandi Aminuddin (1990)

Gambar 9. Pola pusat kota tradisional seperti Jogjakarta, dipakai sebagai model untuk mengembangkan ‘pusat kota’ pada kota-kota di Jawa. Alun-alun yang dikelilingi dengan bangunan kantor Kabupaten, mesjid, penjara serta bangunan pemerintah Belanda (Kantor Residen atau Asisten Residen), menjadi model

PUSAT KOTA-KOTA DI JAWA PADA AWAL ABAD KE 20

Perubahan terhadap sistim administratif pemerintahan kota pada jaman kolonial terjadi pada awal abad ke 20. Yaitu dengan adanya undang-undang desentralisasi (*desentralisatiewet*) pada th.1903, dan baru dilaksanakan th.1905. Pada tahun 1900, penduduk Eropa di Jawa berjumlah kurang lebih 70.000 jiwa, seperempatnya adalah orang Belanda totok, yang baru tiba dari negerinya (van Neil, 1984:26). Mereka ini mayoritas berdiam diberbagai kota besar di Jawa. Undang-undang ini pada prinsipnya ingin memberikan kuasa pada kota-kota yang telah ditentukan untuk memerintah kotanya sendiri dibawah pimpinan seorang Walikota. Banyak kotamadya (*Gemeente*) yang mendirikan pusat pemerintahan baru, dengan mendirikan gedung-gedung dengan gaya arsitektur kolonial modern

sebagai pusat kotanya (bukan disekitar alun-alun). Kota-kota seperti itu contohnya adalah Bandung, Malang, Surabaya dsb.nya. Pemerintah kolonial Belanda ingin memperlihatkan eksistensi kekuasaannya pada pusat kota yang baru dibangun. Salah satu caranya adalah dengan membangun gedung-gedung Kotamadya dengan arsitektur kolonial modern yang baru (lihat gb. no. 10). Selain itu pemerintah kolonial juga ingin menunjukkan suatu citra modern yang lepas dari pengaruh tradisional Jawa, seperti alun-alun dan bangunan sekelilingnya (kantor Kabupaten, mesjid dsb.nya). Sedangkan kawasan perdagangan dianggap tidak termasuk dalam kawasan pusat kota tersebut.



Sumber: Siregar, Sandi Aminuddin (1990)

Gambar 10. Sejak terbentuknya *gemeente* akibat pelaksanaan u.u. desentralisasi Th. 1905, banyak pusat pemerintahan yang pindah dari alun-alun kepusat pemerintahan baru. Contohnya adalah Kotamadya Malang dan Kotamadya Bandung.

Tapi sebagian besar kota-kota Kabupaten di Jawa masih mempertahankan alun-alun dan bangunan disekitarnya sebagai pusat kotanya. Keputusan untuk memindahkan kantor Kotamadya dalam sebuah kawasan pusat kota yang baru hanya berlaku pada kota-kota besar saja seperti Malang, Bandung, Surabaya dsb.nya. Sedangkan kota-kota kecil masih menggunakan alun-alun sebagai pusat

kota, bahkan sampai sekarang. Mengapa kota-kota yang lebih kecil di Jawa waktu itu tidak mengikuti jejak kota-kota besar seperti Surabaya, Malang atau Bandung, salah satu alasannya adalah masalah biaya.

PUSAT KOTA DI JAWA SETELAH KEMERDEKAAN 1945

Tidak ada semacam panduan dalam menentukan pola ‘pusat kota’ setelah kemerdekaan pada kota-kota di Jawa. Sebagian besar kota-kota di Jawa sampai tahun 1970 an, tidak mengalami perluasan yang berarti, meskipun diketahui makin banyak bangunan baru yang didirikan. Sebagian besar ‘pusat kota’ Kabupaten yang terletak disekitar alun-alun di Jawa tetap mempertahankan eksistensinya. Hanya kantor Residen atau Asisten Residen saja yang dihapuskan karena berbau kolonial dan tidak sesuai dengan sistim pemerintahan yang baru.

Setelah tahun 1980 an terjadi perluasan pada kota-kota di Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khususnya. Hal ini disebabkan karena membaiknya iklim ekonomi yang berakibat banyaknya investasi asing yang menanamkan modalnya pada industri menengah dan kecil di pinggiran kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dsb.nya. Kejadian seperti ini disusul dengan makin besarnya urbanisasi pada kota-kota di Jawa. Menurut McGee (1991), proses perkembangan dan urbanisasi pada kota-kota di Jawa setelah th. 1980 an ini ditandai dengan adanya restrukturisasi internal. Salah satu cirinya adalah terjadinya proses pergeseran fungsi ‘pusat kota’, dari pusat manufaktur menjadi pusat kegiatan jasa dan keuangan. Sedangkan kegiatan manufaktur bergeser ke pinggiran kota. Akibatnya, secara fisik restrukturisasi ini ditandai dengan perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran, karena munculnya lokasi-lokasi industri ditepi kota yang kemudian disusul dengan munculnya daerah perumahan baru. Akibatnya kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta dan Surabaya telah mekar menjadi suatu mega-urban, yakni suatu perkembangan wilayah kota yang menjalar kedaerah pedesaan dan berpusat di ‘pusat kota’. Kota-kota kecil di dekat kota besar mempunyai peran dalam pemekaran wilayah kota besar tersebut⁷. Sedangkan pusat kota nya sendiri sudah tidak bisa menampung lagi perkem-

bangunan baru yang terjadi⁸. Semuanya ini merupakan gambaran dari perkembangan kota di Jawa yang berhubungan dengan pusat kota dan pinggiran, setelah tahun 1990 an.

Pada akhir abad ke 20, dimana peran kendaraan bermotor (*automobile*), serta gagasan jalan lingkaran (baik *outer ring road* maupun *inner ring road*), menjadi alat yang sangat penting untuk mendekatkan antara pusat dan pinggiran kota. Kota Jogjakarta misalnya yang berkembang pesat pada akhir abad ke 20, dimana peran kendaraan bermotor dan jalan lingkaran (yang dirancang bebas hambatan), berperan sangat besar untuk mengurangi jarak antara pusat kota (daerah keraton dan Malioboro) dan pinggiran. Akibatnya ada kecenderungan mobilitas penduduk di ‘pusat kota’ ke daerah ‘pinggiran’⁹.

Juga bertambahnya luasan kota-kota besar di Jawa mempersulit adanya pusat kota tunggal. Sebagai contoh misalnya kotamadya Surabaya yang pada tahun 2000 luasannya menjadi : 321,105 km², dibagi menjadi kawasan Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Barat yang masing-masing kawasan diharapkan mempunyai pusat kotanya sendiri. Sehingga susah diidentifikasi mana pusat dan mana pinggiran kotanya.

KESIMPULAN

Ternyata ‘pusat kota’ pada jaman pra kolonial di Jawa lebih mudah untuk ditengarai. Yang dimaksud pusat kota pada jaman pra kolonial waktu itu adalah Keraton dan fasilitas pendukungnya seperti alun-alun dan bangunan disekitarnya yang mendukung kekuasaan penguasa atau raja. Meskipun pada awalnya pusat kota pesisir dan pedalaman mempunyai pola pusat kota yang sama, tapi dalam perjalanan sejarah kota pesisir seperti Lasem, Gresik, Juana dsb.nya menjadikan satu pusat pemerintahan (*political domain*) dan pusat perdagangan (*economical domain*) menjadi ‘pusat kotanya’.

⁷ Di Surabaya terkenal dengan sebutan “Gerbangkertasusilo” (Gresik Bangkalan Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Di Jateng ada Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Demak dan Purwodadi).

⁸ Sebagai contoh adalah makin besar peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik DPR Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya setelah kemerdekaan. Besarnya peran DPR tersebut menuntut adanya gedung baru yang lebih representatif di daerah pusat pemerintahan, sebagai mitra dari kantor gubernur atau gedung Kotamadya. Tapi di banyak kota di Jawa daerah pusat pemerintahan sudah sangat padat sekali, sehingga gedung DPR tersebut kemudian dibangun diluar daerah pusat pemerintahan yang biasanya disebut sebagai pusat kota. Contoh dalam hal ini adalah gedung DPR Propinsi Jawa Timur dan gedung DPRD Kota madya Surabaya yang lokasinya sangat berjauhan dengan daerah pusat pemerintahan

⁹ Data sensus penduduk kota Jogjakarta th. 1999, menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di tengah kota adalah 0%.

Pusat dan pinggiran, dalam konteks sejarah selalu berubah. Pada jaman kolonial pada awalnya VOC, menjadikan *townhall* nya sebagai pusat kota pada kota-kota pesisir. Tapi dalam perjalanan sejarah pada abad ke 18 sampai akhir abad ke 19, Belanda memakai elemen pembentuk ruang kota pada jaman pra kolonial sebagai pusat kotanya. Yaitu alun-alun beserta bangunan pendukungnya sebagai pusat kota dan sekaligus sebagai kontrol administratif atas tanah jajahannya.

Pada awal abad ke 20 terjadi perubahan atas sistim pemerintahan di Hindia Belanda. Perubahan ini akibat dari dikeluarkannya undang-undang desentralisasi th. 1903 dan dilaksanakan pada th. 1905. Pada prinsipnya undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada kota-kota yang ditunjuk sebagai *gemeente* (kotamadya) untuk memerintah sendiri. Perubahan ini membawa dampak pada perpindahan ‘pusat kota’ (terutama pada kota-kota besar di Jawa seperti Malang, Bandung dan Surabaya) dari alun-alun ke daerah elit yang baru yang dibangun oleh penguasa kolonial dengan bangunan kantor kotamadya nya yang menjadi *landmark* kota.

Setelah kemerdekaan sampai tahun 1970 an tidak ada perubahan pada daerah yang disebut sebagai pusat kota di Jawa. Tapi setelah th. 1980 an terjadi gejala pemekaran yang tidak terkontrol pada kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Malang dsb.nya, yang disinyalir oleh McGee (1991), sebagai akibat dari terjadinya proses pergeseran fungsi ‘pusat kota’, dari pusat manufaktur menjadi pusat kegiatan jasa dan keuangan. Secara fisik restrukturisasi ini ditandai dengan perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran, karena munculnya lokasi-lokasi industri ditepi kota yang kemudian disusul dengan munculnya daerah perumahan baru. Sehingga terjadilah istilah mega urban pada kota-kota seperti Surabaya (Gerbangkertasusila) dan Semarang Kedungsepur).

Dari pembahasan tersebut rasanya tidak mungkin ada pusat kota tunggal pada kota-kota besar di Jawa. Kecuali dipaksakan secara politis¹⁰. Tapi pada kota-kota Kabupaten alun-alun dan bangunan sekitarnya masih mungkin untuk dikembangkan sebagai daerah pusat kota. Dengan catatan bahwa pembangunan pusat kota tidak hanya penggunaan kembali dan konservasi kawasan lama, tapi juga mencakup pembuatan desain baru dari bangunan dan

lingkungan sekitarnya, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan baru. Terutama pada era abad ke 21 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.’G, Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa, dalam buku *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, hal. 44-127, Penyusun: Miriam Budiardjo, Sinar Harapan, Jakarta. 1983.
- Behrend, Timothy E., *Kraton and Cosmos in Traditional Java*, Thesis, University of Wisconsin-Madison. 1983.
- Behrend, Timothy E., *Kraton And Cosmos In Traditional Java*, *Archipel* No.37, 1989, hal.173-187.
- Bogaers, Erica, *Ir. Thomas Karsten en de Ontwikkeling van de Stedebouw in Nederlands Indie, 1915-1940*, Universiteit van Amsterdam, Juni 1983
- Catanese, Anthony J., Sejarah Dan Kecenderungan Perencanaan Kota, dalam buku: *Pengantar Perencanaan Kota*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 4 -37.
- Diessen, J.R. van & R.P.G.A. Voskuil, *Stedenatlas Nederlands-Indie*, Asia Maior, Purmerend. 1998.
- Diessen, J.R. van, et.al. *Grote Atlas Van Nederlands Oost Indie*, Asia Maior, Purmerend. 2003.
- Geldern, Robert Heine, *Konsepsi Tentang Negara Dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*, terjemahan Deliar Noer, C.V. Rajawali, Jakarta. 1972.
- Gill, Ronald Gilbert, *De Indische Stad op Java en Madura, een Morphologische Studie van haar Ontwikkeling*. Disertasi Doktor. 1995.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, 3 jilid, PT Gramedia Pusataka Utama, Jakarta. 1996.
- McGee, T.G., The Emergence Of Desakota Regions In Asia: Expanding a Hypothesis. Dalam: N. Ginsburg, B. Koppel and T.G. McGee (eds), *The ExtendedMetropolis: Settlement Transition In Asia*, hal. 3-25, Honolulu University of Hawaii Press. 1991.
- Rapoport, Amos, Asal Usul Budaya Permukiman, dalam buku *Pengantar Perencanaan Kota*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 38-82.

¹⁰ Ada yang mengatakan bahwa pusat dan pinggiran dibentuk dalam representasi politik. Namun pada era demokrasi ini membutuhkan proses perdebatan, kompromi dan persetujuan yang rumit, sehingga membutuhkan suatu proses yang cukup panjang dari rencana ke pelaksanaannya

- Reid , Anthony, The Structure of Cities In Southeast Asia, Fifteenth To Seventeenth dalam *Journal Of Southeast Asian Studies*, Vol.XI, no.2, September 1980, hal. 235-250.
- Santoso, Suryadi Jo., Dinamika Perkembangan Arsitektur di Jaman Prakolonial di P. Jawa dalam Majalah *Dimensi* no.5, 1981, hal. 34-36.
- Santoso, Suryadi Jo Dinamika Perkembangan Arsitektur Jaman Prakolonial Di Pulau Jawa dalam majalah *Cipta*, Tahun X, 1981a, No.57, hal.22-28.
- Santoso, Suryadi Jo., *Konsep Struktur & Bentuk Kota Jawa s/d Abad 18*, (tanpa penerbit). 1984.
- Siregar, Sandi Aminuddin, *Bandung The Architecture Of The City In Devolopment*, Disertasi pada K.U. Leuven, Belgie. 1990.
- Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Sinar Harapan, Jakarta. 1983.
- Van Neil, Robert, *Munculnya Elit Modern Indone-sia*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta. Indonesia. 1984.
- Wiryomartono, A. Bagoes P., *Seni Bangunan Dan Seni Binakota Di Indonesia*, PT Gramedia Pusataka Utama, Jakarta. 1995.